



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

**INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
TIM SENERGI BADAN KEAHLIAN
SETJEN DPR RI**

KEGIATAN
MS II Tahun Sidang 2021-2022
(13 – 24 Desember 2021)

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

DIKELOLA OLEH:

TIM SINERGI ANTARA BADAN KEAHLIAN, PARA KABAG SET AKD DEPUTI PERSIDANGAN, DAN TENAGA AHLI AKD.

F 9/1/22

DAFTAR ISI

KOMISI II	1
A. FUNGSI LEGISLASI	1
B. FUNGSI ANGGARAN	1
C. FUNGSI PENGAWASAN	1
D. TUGAS KHUSUS	2
KOMISI III	3
A. FUNGSI LEGISLASI	3
B. FUNGSI ANGGARAN	6
C. FUNGSI PENGAWASAN	6
KOMISI IV	8
A. FUNGSI LEGISLASI	8
B. FUNGSI ANGGARAN	8
C. FUNGSI PENGAWASAN	8
KOMISI V	14
A. FUNGSI LEGISLASI	14
B. FUNGSI ANGGARAN	14
C. FUNGSI PENGAWASAN	14

KOMISI VI	16
A. FUNGSI LEGISLASI	16
B. FUNGSI ANGGARAN	17
C. FUNGSI PENGAWASAN	18
KOMISI VII	22
A. FUNGSI LEGISLASI	22
B. FUNGSI ANGGARAN	22
C. FUNGSI PENGAWASAN	22
KOMISI VIII	24
A. FUNGSI LEGISLASI	24
B. FUNGSI ANGGARAN	24
C. FUNGSI PENGAWASAN	24
KOMISI IX	27
A. FUNGSI LEGISLASI	27
B. FUNGSI ANGGARAN	27
C. FUNGSI PENGAWASAN	27

KOMISI X	30
A. FUNGSI LEGISLASI	30
B. FUNGSI ANGGARAN	30
C. FUNGSI PENGAWASAN	30
KOMISI XI	33
A. FUNGSI LEGISLASI	33
B. FUNGSI ANGGARAN	33
C. FUNGSI PENGAWASAN	39
BADAN ANGGARAN	48
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN	49
MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN	51
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA	52
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA	54

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI II

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Pemerintah Daerah Kota Depok, Kota Tangerang Selatan dan Kota Bogor	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.	Melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Depok, Kota Tangerang Selatan dan Kota Bogor	Terkait evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pertanahan
2.	Pemerintah Daerah dan ATR/BPN Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Barat (Kunker Reses Masa Persidangan II)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.	Melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Barat	Terkait evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Reformasi Birokrasi, dan Pelayanan Publik, Evaluasi Pelaksanaan Program KTP-el, Evaluasi Seleksi CPNS dan PPPK Tahun 2021,

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				Evaluasi Pengembangan Kompetensi SDM, serta Evaluasi Pelaksanaan Program-program Prioritas Pertanahan.

D. TUGAS KHUSUS

1. Mengajukan, memberikan persetujuan, atau memberikan pertimbangan atas keputusan berdasarkan mufakat;
2. Pemberian pertimbangan terhadap calon duta besar;
3. Persetujuan pemindahtanganan asset negara;
4. Persetujuan perjanjian internasional yang berdampak luas;
5. Pemilihan anggota BPK;
6. Penegakan kode etik;
7. Kerja sama antar parlemen;
8. Akuntabilitas keuangan;
9. Kerumahtangaan DPR RI;

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI III

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN RI, selanjutnya disebut RUU tentang Kejaksaan.	Pengambilan Keputusan Tk. II tanggal 7 Desember 2021.	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan Komisi III DPR RI kepada Rapat Paripurna dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi III, Bp. Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.2. Dalam laporannya disebutkan bahwa ada beberapa perubahan, penyesuaian dan penambahan substansi yang dilakukan di Timus/Timsin dan Panitia Kerja, yakni sebagai berikut;,<ol style="list-style-type: none">a. Ketentuan Umumb. Usia Pengangkatan Jaksa & Usia Pemberhentian Jaksa dengan hormatc. Penegasan Lembaga Pendidikan Khusus Kejaksaand. Penugasan Jaksa pada instansi lain selain pada Kejaksaan RIe. Pelindungan Jaksa dan keluarganyaf. Perbaikan ketentuan pemberhentian Jaksag. Jaksa Agung sebagai Pengacara Negara	Pengambilan Keputusan Tk. II dalam Rapat Paripurna menyetujui RUU tentang Kejaksaan disetujui menjadi UU dan segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> h. Jaksa Agung sebagai Kuasa Hukum Perkara MK i. Perbaikan ketentuan pemberhentian Jaksa Agung j. Tugas dan Wewenang Jaksa k. Wewenang & Tugas Jaksa Agung 	
2.	RUU TENTANG PENYADAPAN	<i>Focus Group Discussion (FGD)</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Tema FGD: “Urgensi RUU Penyadapan dalam Sistem Penegakan Hukum berbasis prinsip <i>Due Process of law</i>” b. Narasumber: <ul style="list-style-type: none"> 1) Komisi III DPR RI, (H. Arsul Sani, S.H., M.Si.) ✓ <i>Pemaparan umum RUU tentang Penyadapan dan perkembangannya.</i> 2) Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, (Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.) ✓ <i>Paparan mengenai Mekanisme pemberian izin Penyadapan dalam kerangka Integrated Criminal Justice System.</i> 3) Sekjen Mahkamah Konstitusi, (Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H) 	Pelaksanaan kegiatan FGD tanggal 15 Desember 2021, bertempat di Ballroom-Ritz Carlton Pacific Place Jakarta.

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>✓ <i>Paparan yang disampaikan mengenai Kewenangan dan Pengaturan Penyiadapan yang sesuai dengan Konstitusi dan HAM.</i></p> <p>4) Kepala Badan Keahlian DPR RI, (Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.)</p> <p>✓ <i>Pemaparan mengenai Hal-hal Krusial Draf RUU Penyiadapan.</i></p> <p>c. <i>Stakeholder yang diundang:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepolisian RI (Bareskrim Polri) 2) Kejaksaan RI 3) Kementerian Hukum dan HAM RI 4) Mahkamah Agung 5) Mahkamah Konstitusi 6) Komisi Yudisial 7) Komisi Pemberantasan Korupsi 8) Badan Narkotika Nasional 9) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 10) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 11) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 12) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			13) Badan Keahlian DPR RI 14) Kementerian Komunikasi dan Informatika 15) Badan Intelijen Negara	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	MAHKAMAH KONSTITUSI	PERTEMUAN KONSULTASI	<p>Pertemuan Konsultasi dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM, membahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan perkara baik pengujian undang-undang, sengketa pemilu dan pemilukada, dan seketa kewenangan antar lembaga negara 2. Manajemen penanganan perkara dan pengawasan internal di Mahkamah Konstitusi. 3. Hal-hal aktual ketatanegaraan yang terjadi 	<p>Pertemuan Konsultasi Komisi III dengan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Desember 2021 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM, dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI perwakilan dari masing-masing proporsional fraksi.</p>

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			hingga tahun 2021 dan permasalahan yang terjadi di lingkungan internal Mahkamah Konstitusi.	
2.	1. Kepala Kepolisian Daerah 2. Kepala Kejaksaan Tinggi 3. Kepala BNN Provinsi 4. Ketua Pengadilan Tinggi 5. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama 7. Kepala Pengadilan Tinggi Militer	KUNKER RESES	Komisi III DPR RI melaksanakan kunker reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 ke 3 (tiga) daerah, yaitu: 1. Provinsi Sulawesi Tenggara , tanggal 17 sd 21 Desember 2021, dipimpin oleh Bp Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M. 2. Provinsi Kepri , tanggal 17 sd 21 Desember 2021, dipimpin oleh Bp Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. 3. Provinsi Banten , tanggal 17 sd 21 Desember 2021, dipimpin oleh Bp H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IV

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEGIATAN		INFO SINGKAT
1.	Rapat Intern Panja Pengawasan	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Perumusan Rekomendasi Panja Hortikultura untuk disampaikan kepada Pimpinan DPR RI dengan beberapa masukan antara lain mendorong pengembangan rantai dingin, penegasan rekomendasi impor dalam rangka perlindungan petani serta sinkronisasi regulasi sebagai tindak lanjut UU Cipta Kerja
3.	Rapat Intern Panja Pengawasan	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	a. Perumusan Rekomendasi Panja Pencemaran Sampah dan Limbah untuk disampaikan kepada Pimpinan DPR RI. b. Panja Pencemaran Sampah dan Limbah sepakat untuk membentuk kembali Panja terkait pencemaran sampah dan limbah, dalam rangka melakukan pengawasan pengelolaan sampah dan limbah yang berpotensi mencemari lingkungan serta membahayakan dan merugikan masyarakat.

NO	KEGIATAN		INFO SINGKAT
4.	Rapat Intern Panja Pengawasan	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	a. Perumusan Rekomendasi Panja Pencegahan, Pengendalian, serta Penindakan Kebakaran Hutan dan Lahan untuk disampaikan kepada Pimpinan DPR RI. b. Panja Pencegahan, Pengendalian, serta Penindakan Kebakaran Hutan dan Lahan sepakat untuk tidak membentuk kembali Panja terkait kebakaran hutan dan lahan, mengingat dalam beberapa tahun terakhir jumlah serta luas kejadian kebakaran hutan dan lahan menunjukkan angka yang semakin rendah (menurun).
5.	Rapat Intern Panja Pengawasan	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Perumusan Rekomendasi Panja Sarana Prasarana dan Permasalahan Masyarakat kelautan Perikanan untuk disampaikan kepada Pimpinan DPR RI dengan beberapa masukan antara lain mendorong ada penambahan anggaran; menambah infrastruktur kapal pengawas; optimalisasi bantuan permodalan bagi kelompok masyarakat, Koperasi dan UMKM; mengalokasikan kuota penerimaan PPPK dan CPNS sebagai penyuluh Perikanan; membangun infrastruktur pendukung di sentra perikanan budidaya dan perikanan tangkap, seperti fasilitas listrik, irigasi, jalan produksi, transportasi/logistik, rantai dingin, dan sebagainya.

NO	KEGIATAN		INFO SINGKAT
6.	Rapat Intern Komisi IV DPR RI	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Komisi IV DPR RI menyetujui Rekomendasi Panja Komisi IV DPR RI di Bidang Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kelautan dan Perikanan untuk disampaikan kepada Pimpinan DPR RI. b. Menyetujui keputusan Panja Komisi IV DPR RI di Bidang Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kelautan dan Perikanan, untuk: <ul style="list-style-type: none"> 1) Membentuk Panja terkait pengelolaan dan pengembangan sawit rakyat. 2) Membentuk kembali Panja terkait penyelesaian permasalahan penggunaan kawasan hutan, dalam rangka melakukan pengawasan atas penyelesaian kasus pertambangan dan perkebunan dalam kawasan hutan, penyelesaian permasalahan kebun sawit milik rakyat di dalam kawasan hutan, serta penyelesaian kewajiban pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan/Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan. 3) Membentuk kembali Panja terkait pencemaran sampah dan limbah, dalam rangka melakukan pengawasan pengelolaan sampah dan limbah yang berpotensi mencemari lingkungan serta

NO	KEGIATAN		INFO SINGKAT
			<p>membahayakan dan merugikan masyarakat</p> <p>4) Tidak membentuk kembali Panja terkait kebakaran hutan dan lahan, mengingat dalam beberapa tahun terakhir jumlah serta luas kejadian kebakaran hutan dan lahan menunjukkan angka yang semakin rendah (menurun).</p> <p>5) Membentuk kembali Panja terkait sarana prasarana dan permasalahan masyarakat kelautan perikanan, mengingat masih banyak infrastruktur yang perlu dipantau dan banyak permasalahan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar, serta masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang belum termonitor.</p>
7.	Kunjungan Kerja Spesifik	<p>a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah</p>	<p>Kunjungan Kerja ke Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meninjau dan berdiskusi dengan masyarakat terkait dengan bencana banjir bandang di Desa Cinta Cintamanik - Berdiskusi dengan masyarakat terkait dengan lahan pertanian yang terdampak banjir bandang di Desa Cinta Cintamanik
8.	Kunjungan Kerja Spesifik	<p>a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah</p>	<p>Kunjungan Kerja ke Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan diskusi mengenai Program Kemitraan Konservasi oleh Balai Taman Nasional Gunung Merapi

NO	KEGIATAN		INFO SINGKAT
			<ul style="list-style-type: none"> - Meninjau dan berdiskusi dengan pelaksana kegiatan Penyelamatan Tumbuhan Langka Merapi oleh Masyarakat di Dusun Batur, Cangkringan, Sleman
9.	Kunjungan Kerja Spesifik	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah 	Kunjungan Kerja ke Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah <ul style="list-style-type: none"> - Meninjau Gudang Pusat Distribusi BULOG Ngabeyan Solo dalam rangka meninjau kesiapan Bahan Pokok Utama menjelang Natal dan Tahun Baru - Meninjau Korporasi Peternak sapi dan Peternak Unggas di Desa Kunti Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali - Meninjau Pembudidaya ikan lele di Desa Kacangan Kecamatan Andong kabupaten Boyolali
10.	Kunjungan Kerja Spesifik	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah 	Kunjungan Kerja ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur <ul style="list-style-type: none"> - Meninjau areal eks tambang batu bara yang mengalami pencemaran tanah dan kerusakan lingkungan - Berdiskusi dengan Wakil Masyarakat Desa Mentawir, Kabupaten Penaman Paser Utara yang terdampak pencemaran tanag dan kerusakan lingkungan
11.	Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan II 2021-2022	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah 	Kunjungan Kerja Reses ke Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

NO	KEGIATAN		INFO SINGKAT
			<ul style="list-style-type: none"> - Meninjau dan berdiskusi di Kantor Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Balikpapan - Meninjau dan berdiskusi mengenai Program Pekarangan Lestari dengan Kelompok Wanita Tani 28 Sepinggan Raya, Kota Balikpapan - Berdiskusi mengenai Progres Pembangunan Ibukota Negara Baru di Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam di Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara
12.	Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan II 2021-2022	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah 	<p>Kunjungan Kerja ke Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Pertemuan dengan Pengusaha dan petani pisang Cavendis di Ngaringan, Gandusari, Kabupaten Blitar. - Melakukan pertemuan dengan petani dan peternak di Koperasi Petani Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar terkait dengan pengadaan pakan ternak . - Meninjau Republik Lele di Jl Asparaga, Tegalsari, Tulungrejo, Kec Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. - Meninjau TPA Sekoto, Genukwatu, Sekoto, Kec Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. - Meninjau Gudang Bulog Kancab Surabaya Utara.

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI V

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU Perubahan atas UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan	16 Des 2021	Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU Perubahan atas UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEGIATAN	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan Kerja Spesifik Tgl 13 Des 2021	Meninjau Pelabuhan Penyeberangan Merak – Bakauheni	Komisi V DPR RI melakukan kunjung ke Pelabuhan Penyerberangan Merak – Bakauheni untuk melihat secara langsung persiapan Pemerintah dalam mengantisipasi adanya lonjakan penumpang yang akan menyeberang ke Lampung melalui Pelabuhan Merak dan juga untuk melihat upaya pengetatan dan penerapan protokol kesehatan pada masa Pandemi Covid 19	

NO	KEGIATAN	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	Kunker Reses Tgl 17 s.d 21 Des 2021		<ul style="list-style-type: none">- Kunker Reses ke Kalimantan Timur- Kunker Reses ke Papua Barat- Kunker Reses ke Aceh	

**LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI VI**

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement, RCEP), (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of The Republic Indonesia and The Government of The Republic of Korea, IK-CEPA), ASEAN Trade in Services	Rapat Kerja Bersama Menteri Perdagangan n RI, 13 Desember 2021	Terkait Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement, RCEP), Komisi VI DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan RI. Rapat Kerja ini menghasilkan catatan antara Komisi VI DPR RI sepakat terkait Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement, RCEP) pengesahannya akan dilakukan dengan Undang-Undang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 84 ayat (3) huruf a. karena berdampak akan menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Selain itu Komisi VI DPR RI juga menyepakati terkait Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of The Republic Indonesia and The Government of The Republic of Korea, IK-CEPA) pengesahannya akan dilakukan dengan Undang-Undang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 84 ayat (3)	Pengesahannya akan dilakukan dengan Undang-Undang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 84 ayat (3) huruf a. karena berdampak akan menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	Agreement (ATISA).		huruf a. karena berdampak akan menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.	
2	RUU BUMN	Rapat Panja RUU BUMN Komisi VI DPR RI	Panja RUU BUMN mengadakan rapat terakhir dalam rangka pembahasan dan penetapan draft naskah akademik dan RUU BUMN. Rapat yang dipimpin oleh M.Hekal sebagai ketua Panja RUU BUMN Komisi VI DPR RI turut menghadirkan Badan Keahlian DPR RI. Rapat menetapkan naskah akademik dan RUU BUMN final yang selanjutnya akan dilaporkan dalam rapat internal Komisi VI DPR RI sebelum diteruskan ke Badan Legislasi DPR RI untuk masuk dalam tahap selanjutnya yaitu proses Harmonisasi.	
3	RUU BUMN	Rapat Internal Komisi VI DPR RI	Rapat Internal Komisi VI DPR RI dilaksanakan dalam rangka pelaporan hasil kerja Panja Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang BUMN. Pada rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, telah dilaporkan hasil kerja Panja RUU BUMN oleh ketua Panja yaitu Mohamad Hekal dengan hasil akhir berupa naskah akademik dan RUU BUMN Final. Rapat ini menyepakati naskah akademik dan RUU BUMN tersebut yang selanjutnya akan disampaikan ke Badan Legislasi DPR RI untuk dilakukan harmonisasasi.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	PT Pertamina (Persero)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah 	<p>Komisi VI DPR RI melakukan Rapat Panja BUMN Energi. Rapat Panja ini menghadirkan Direktur Utama Pertamina dalam rangka membahas struktur organisasi PT Pertamina (Persero) dan anak perusahaannya. Dalam rapat Panja ini menghasilkan agar pada masa sidang berikutnya mengundang PT PLN (Persero) terkait langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan terkait target dari Pemerintah di bidang ekonomi hijau (green energy), Mind ID terkait langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan terkait target dari Pemerintah di bidang ekonomi hijau (green energy), serta Anak perusahaan hulu dan hilir PT Pertamina (Persero).</p>	<p>Rapat Panja BUMN Energi, 13 Desember 2021</p>
2.	Kementerian BUMN, PT Perusahaan Pengelola Asset (Persero), PT Danareksa (Persero), PT Barata Indonesia (Persero).	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah 	<p>Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri II BUMN membahas terkait rencana Restrukturisasi PT Barata Indonesia (Persero). Dalam rapat kerja ini memutuskan Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN senantiasa memperhatikan kondisi supplier atau vendor BUMN mengingat sebagian besar supplier adalah pelaku usaha UMKM yang juga mempunyai peran yang besar dalam pembukaan lapangan pekerjaan di Indonesia. Diharapkan proses PKPU PT Barata Indonesia (Persero) tidak menyebabkan penurunan kualitas kredit supplier kepada perbankan. Selain itu Komisi VI DPR RI juga mendukung langkah penyelesaian supplier PT Barata Indonesia (Persero) yang dibiayai oleh PT Bank Syariah Indonesia, Tbk sesuai dengan koridor yang telah diputuskan dalam</p>	<p>Rapat Kerja dengan Wakil Menteri BUMN II, 14 Desember 2021</p>

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			PKPU yaitu melalui novasi pembiayaan supplier kepada PT Barata Indonesia (Persero), serta mendukung proses diskusi business to business yang berkelanjutan antara PT Jamkrindo Syariah dan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk sebagai bagian dari perbaikan ekosistem pembiayaan supplier di lingkungan BUMN	
3.	PT Pertamina Gas Negara (Persero), Perusahaan Listrik Negara (Persero), Kementerian Perdagangan RI, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Bukit Asam, Tbk, Mining Industry Indonesia (MIND ID), PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah 	Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke PT Pertamina Gas Negara (Persero), Perusahaan Listrik Negara (Persero), Kementerian Perdagangan RI, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Bukit Asam, Tbk, Mining Industry Indonesia (MIND ID), PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk di Surabaya Provinsi Jawa Timur terkait realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan rencana strategi yang akan dilakukan oleh mitra kunjungan reses. Kunjungan kerja reses ini memiliki beberapa catatan kepada mitra kunjungan yaitu mitra kunjungan agar memberikan laporan keuangan perusahaan priode 5 Tahun kebelakang agar bisa dilakukan perbandingan, Mitra kunjungan agar memberikan kemudahan dalam merealisasikan program-program yang ada kepada dimasyarakat, mitra kunjungan agar lebih mensinergikan koordinasi dari Pusat kepada BUMN yang ada di regional-regional dan meminta agar PT Bukit Asam, Tbk untuk mengadakan Focus Group Discussion (FGD) tindak lanjut dari Kunjungan Reses Jawa Timur di Tanggal 17 Desember 2021.	Kunjungan Kerja Reses Surabaya, 17-21 Desember 2021

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	Kementerian Koperasi dan UKM RI, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), Perum Perhutani, PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PTPN IX	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Komisi VI DPR RI melaksanakan kunjungan kerja reses ke Provinsi Jawa Tengah, dengan menghadirkan mitra kerja Komisi VI DPR RI diantaranya Kementerian Koperasi dan UKM RI, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), Perum Perhutani, PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PTPN IX. Kunjungan kerja reses ini bertujuan untuk mengetahui jalannya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Provinsi Jawa Tengah, khususnya berkaitan dengan bantuan social dan program pemerintah lainnya. Beberapa catatan dari Komisi VI DPR RI diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Koperasi dan UKM masih sangat lambat dalam hal pembinaan pelaku UKM. • Kementerian Koperasi dan UKM diharapkan dapat menyiapkan pusat layanan usaha terpadu dalam hal pembinaan UKM. • Perum Perhutani harus segera melakukan digitalisasi produk. • PT Pupuk Indonesia (Persero) agar memperbaiki data e-RDCK sehingga pupuk bersubsidi diterima oleh petani sesuai dengan sasaran. • Meminta seluruh mitra dalam kunjungan kerja reses ini agar melakukan digitalisasi data dan system teknologi sehingga pendataan yang dilakukan transparan dan berkeadilan. 	Kunjungan Kerja Reses Solo, 17-21 Desember 2021

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Semen Indonesia Tbk, PT Timah Tbk, PT Aviassi dan Pariwisata Indonesia, PT Angkasa Pura I (Persero), PT PELNI (Persero) dan BP Batam	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Semen Indonesia Tbk, PT Timah Tbk, PT Aviassi dan Pariwisata Indonesia, PT Angkasa Pura 1 (Persero), PT PELNI (Persero) dan BP Batam di Provinsi Kepulauan Riau terkait realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan rencana strategi yang akan dilakukan oleh mitra kunjungan reses. Kunjungan kerja reses ini memiliki beberapa catatan kepada mitra kunjungan yaitu Mitra kunjungan agar memberikan laporan kinerja keuangan dan operasional perusahaan selama 3 Tahun terakhir, khususnya dalam kondisi pandemi Covid 19.	Kunjungan Kerja Reses Batam, 17-21 Desember 2021

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEGIATAN	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan Kerja Spesifik	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	a. Provinsi Jawa Barat Peninjauan ke Pusat Teknologi Penerbangan LAPAN di Rumpin, Bogor b. Provinsi Jawa Barat Peninjauan PT Kimia Farma Sungwun Phamacopia (KFSP) Pabrik bahan baku obat di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi c. Provinsi Jawa Timur Peninjauan ke Kabupaten Lumajang Pasca Erupsi Gunung Semeru	

NO	KEGIATAN	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	Kunjungan Kerja pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Provinsi Jawa Barat Peninjauan PT Bio Farma (Persero) di Kota Bandung b. Provinsi Jawa Timur Peninjauan Smelter PT Freeport Indonesia di KEK Gresik c. Provinsi Kalimantan Timur Peninjauan ke Pemda Kutai Katanegera dan Kawasan Pertambangan Batubara 	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	<ul style="list-style-type: none">• Perkembangan penanggulangan bencana dan mitigasi bencana di akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022• Isu-isu Aktual	<ol style="list-style-type: none">a. Komisi VIII DPR RI meminta Kepala BNPB untuk meningkatkan mitigasi bencana pada akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022.b. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam penanggulangan korban bencana erupsi Gunung Semeru.c. Memastikan besaran biaya karantina bagi WNI yang baru pulang dari luar negeri.	Perlu mitigasi yang kuat untuk memastikan bahwa potensi bencana yang terjadi pada akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022 dapat dideteksi dan diantisipasi sedini mungkin.

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>d. Mewaspadaai munculnya gelombang ke-3 Covid-19 dengan adanya varian baru Omricon, yang dikhawatir-kan akan mengakibatkan lonjakan kasus Covid-19 seperti pada saat munculnya varian Delta.</p>	
2.	Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Kota Palembang (Sumsel), Kota Denpasar (Bali), dan Kota Mataram (NTB)	<p>a. Kebijakan mengenai pembelajaran tatap muka (PTM) di lingkungan pendidikan keagamaan Kementerian Agama RI;</p> <p>b. Implementasi bantuan sosial di lingkungan Kementerian Sosial RI;</p> <p>c. Pengawasan terhadap perlindungan perempuan dan perlindungan anak di bawah koordinasi Kementerian PPPA RI;</p> <p>d. Kesiapsiagaan bencana di berbagai daerah rawan bencana di Indonesia yang dikomandoi oleh BNPB.</p>	<p>a. Kebijakan PTM yang dilaksanakan di berbagai lembaga pendidikan keagamaan di lingkungan Kementerian Agama RI berjalan relatif baik karena dilaksanakan secara <i>hybrid/blended</i> dengan menempatkan kesehatan sebagai prioritas utama.</p> <p>b. Bantuan sosial yang diimplementasikan pada masa pandemi Covid-19 sudah berjalan cukup baik, tinggal meningkatkan validitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).</p>	Perlu optimalisasi program dan anggaran dalam meningkatkan target atau capaian program.

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>c. Perlindungan terhadap perempuan dan anak membutuhkan kepedulian dan kerjasama semua pihak terkait.</p> <p>d. Kesiapsiagaan bencana yang digelar menjelang akhir tahun ini diharapkan dapat meningkatkan mitigasi dan mereduksi jumlah kerugian baik jiwa maupun harta.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IX

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	Panja menugaskan tim asistensi untuk mempersiapkan pendalaman substansi RUU sesuai masukan anggota Panja.	<ul style="list-style-type: none">Tidak ada kegiatan Panja	<ul style="list-style-type: none">Panja akan melakukan pembahasan draft RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan pada Masa Persidangan III TS 2021-2022.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Tanggal 14 Desember 2021, Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan RI, RDP dengan Kepala Badan POM RI dan RDPD dengan ITAGI dan PT Biofarma	Membahas perkembangan pelaksanaan program vaksinasi <i>booster</i> 2022, termasuk sumber pembiayaan dan rencana pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none">Demi mempercepat program vaksinasi COVID-19, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk :<ul style="list-style-type: none">memberikan dukungan penuh bagi daerah yang cakupan vaksinasinya masih	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>di bawah 70% dan vaksinasi lansia di bawah 60% melalui peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI dan pemerintah daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ menggunakan vaksin produksi dalam negeri paling lambat tahun 2022; dan ○ membuat rincian kebutuhan vaksin sekaligus strategi pengadaannya untuk Tahun 2022, baik untuk vaksin program termasuk vaksin kelompok usia 6-11 tahun serta vaksin booster. <ul style="list-style-type: none"> • Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk berkoordinasi dengan Kementerian Sosial RI berkaitan dengan perbaikan data peserta PBI untuk memastikan rakyat kurang mampu mendapatkan vaksinasi <i>booster</i> • menyiapkan perencanaan vaksin booster secara matang dari regulasi yang jelas, pembiayaan yang cukup, penentuan harga vaksin booster yang terjangkau 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>dan strategi pelaksanaannya yang transparan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komisi IX DPR RI Mendesak Kementerian Kesehatan RI, Badan POM RI dan Komnas PP KIPi untuk melakukan penguatan surveilans KIPi terhadap vaksinasi kelompok usia 6-11 tahun dan kohort anak usia 12 tahun. • Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan Badan POM RI bekerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait keamanan vaksin pada kelompok usia 6-11 dan vaksin booster yang digunakan dalam program vaksinasi COVID-19 agar dapat diterima oleh masyarakat sehingga dapat dilaksanakan secara optimal. 	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI X

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KET
1	16 Desember 2021 Rapat Intern Komisi X DPR RI	Komisi X DPR RI menyepakati untuk melanjutkan masa kerja Panja RUU Tentang SKN dan memperpanjang masa kerja Panja RUU Tentang Praktik Psikologi pada Masa Sidang III Tahun Persidangan 2021-2022.	-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT
1	Kemenparekraf/Baparekraf RI	13-15 Desember 2021 Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Ekraf ke Kota Cirebon, Kabupaten Garut dan Kabupaten Purwakarta	Secara umum ditemukan 1. Pelaku Ekraf masih memiliki kendala antara lain dalam penguatan SDM, promosi, HKI dan Bahan Baku. 2. Perlu peningkatan pendampingan bagi pelaku Ekraf

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT
2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemendikbudristek RI 2. Kemenparekraf/Baparekraf RI 3. Kemenpora RI 4. Perpusnas RI 	<p>17-21 Desember 2021</p> <p>Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Bali, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan</p>	<p>Secara umum ditemukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleksi guru PPPK tahap I dan II yang masih dikeluhkan, antara lain dalam hal soal yang terlalu banyak dan kuota yang terbatas di suatu sekolah sehingga untuk tahap III harus mendaftar melalui sekolah lain. 2. Dalam bidang pariwisata secara umum masih terdampak pandemic Covid-19 meskipun kunjungan mulai ada peningkatan. 3. Dalam bidang olahraga, pelaksanaan event dan juga Latihan masih terkendala pandemi Covid-19, namun dalam dua bulan terakhir mulai ada aktivitas Latihan dan lain-lain. 4. Dalam bidang perpustakaan, tingkat kunjungan ke perpustakaan daerah masih rendah.
3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemendikbudristek RI 2. Kemenparekraf/Baparekraf RI 3. Kemenpora RI 4. Perpusnas RI 	<p>16 Desember 2021</p> <p>Rapat internal Komisi X DPR RI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi X DPR RI menyepakati untuk melanjutkan masa kerja Panja RUU Tentang SKN dan memperpanjang masa kerja Panja RUU Tentang Praktik Psikologi pada Masa Sidang III Tahun Persidangan 2021-2022. 2. Komisi X DPR RI menyepakati untuk melanjutkan masa kerja Panja MBKM pada Masa Sidang III Tahun Persidangan 2021-2022. 3. Komisi X DPR RI menyepakati untuk menyelesaikan masa kerja Panja Desa Wisata dan Kampung Tematik pada Masa Sidang II Tahun Persidangan 2021-2022.

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT
			4. Komisi X DPR RI menyepakati Kunjungan Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022, pada awal masa reses (17-21 Desember 2021), ke daerah sebagai berikut: a. Provinsi Bali. b. Provinsi Sumatera Selatan. c. Provinsi Kalimantan Selatan.

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	JENIS RAPAT	AGENDA	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Kerja dengan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan	Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2022	<ol style="list-style-type: none">1. Komisi XI DPR RI menilai bahwa kinerja OJK pada Tahun 2021 tidak optimal dan masih perlu ditingkatkan kualitasnya, khususnya dalam hal perlindungan konsumen, pembelaan hukum untuk konsumen, pengawasan pinjaman online, dan literasi keuangan.2. Pungutan OJK yang tidak digunakan tahun 2021, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKA OJK oleh Komisi XI DPR RI disetorkan ke kas negara.3. Menyetujui Rencana Kerja dan Prognosa Anggaran Penerimaan Otoritas Jasa Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.325.731.998.930,00 (Enam Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu	Rapat tanggal 9 Desember 2021

NO	JENIS RAPAT	AGENDA	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Pungutan bidang Perbankan sebesar Rp4.483.105.873.763,00 (Empat Triliun Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Seratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah);</p> <p>b. Pungutan bidang Pasar Modal sebesar Rp893.726.847.186,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah);</p> <p>c. Pungutan bidang IKNB sebesar Rp797.660.753.990,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah);</p> <p>d. Pengelolaan sebesar Rp151.238.523.991,00 (Seratus Lima Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima</p>	

NO	JENIS RAPAT	AGENDA	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).</p> <p>Dalam persetujuan tersebut terdapat beberapa catatan antara lain:</p> <p>a. Dewan Komisioner OJK akan menyampaikan dan melengkapi data-data penerimaan dari seluruh jenis pungutan yang diperoleh dari industri.</p> <p>b. meningkatkan penguatan fungsi pengawasan dan pengaturan antara lain melalui perbaikan organisasi. Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kualitas SDM OJK sebagai pengatur dan pengawas di bidang jasa keuangan.</p> <p>4. Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Pengeluaran Operasional Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022 sebesar Rp6.325.731.998.930,00 (Enam Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Kegiatan Operasional sebesar Rp521.801.102.172,00 (Lima</p>	

NO	JENIS RAPAT	AGENDA	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Ratus Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Satu Juta Seratus Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).</p> <p>b. Kegiatan Administratif sebesar Rp5.260.312.233.601,00 (Lima Triliun Dua Ratus Enam Puluh Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Satu Rupiah).</p> <p>c. Kegiatan Pengadaan Aset sebesar Rp543.537.719.763,00 (Lima Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).</p> <p>d. Kegiatan Pendukung Lainnya sebesar Rp80.943.394,00 (Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).</p> <p>Dalam persetujuan tersebut terdapat beberapa catatan agar upaya, kebijakan, program, dan kegiatan Otoritas Jasa Keuangan diarahkan untuk:</p>	

NO	JENIS RAPAT	AGENDA	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>a. Penguatan program pada pengawasan, perlindungan konsumen, edukasi dan literasi, serta penguatan organisasi dan SDM.</p> <p>b. Indikator Kinerja Utama (IKU) OJK pada tahun 2022 agar dicapai secara efektif dan efisien dibandingkan pada tahun sebelumnya.</p> <p>Penyesuaian anggaran pengeluaran OJK 2022 disampaikan pada Triwulan-I tahun 2022 untuk ditetapkan Komisi XI DPR RI.</p> <p>5. Arah strategis kebijakan OJK tahun 2022 agar diarahkan untuk:</p> <p>a. Mengantisipasi dampak risiko <i>cliff effect</i> dari normalisasi kebijakan dan potensi risiko perkembangan Covid-19;</p> <p>b. Mendorong percepatan transformasi ekonomi digital;</p> <p>c. Meningkatkan efektivitas program inklusi keuangan dan perlindungan konsumen;</p> <p>d. Mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan sektor jasa keuangan dan sektor jasa keuangan syariah;</p>	

NO	JENIS RAPAT	AGENDA	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>e. Melanjutkan inisiatif perubahan proses bisnis pengawasan dari <i>traditional approach</i> ke arah pengawasan sektor jasa keuangan terintegrasi berbasis teknologi informasi;</p> <p>f. Melakukan percepatan reformasi pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB);</p> <p>g. Mengembangkan organisasi yang akuntabel, efektif, dan efisien; dan</p> <p>h. Memperkuat program pembelaan hukum untuk konsumen dan masyarakat.</p> <p>6. Otoritas Jasa Keuangan akan terus meningkatkan sistem penganggaran dan evaluasinya yang mengkaitkan tujuan dan tugas Otoritas Jasa Keuangan dengan anggaran kegiatan operasional, anggaran kegiatan administratif, anggaran kegiatan pengadaan aset, anggaran kegiatan pendukung lainnya, <i>input</i>, <i>output</i>, <i>outcome</i>, dan kinerja Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>7. Apabila terdapat penyesuaian anggaran yang berdampak pada besaran anggaran dan/atau Indikator Kinerja Utama maka Otoritas Jasa</p>	

NO	JENIS RAPAT	AGENDA	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Keuangan harus menyampaikan kepada Komisi XI DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. Apabila dalam 20 hari kerja, Otoritas Jasa Keuangan tidak mendapatkan persetujuan, maka Otoritas Jasa Keuangan akan melaporkan dalam laporan triwulan berikutnya.	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	JENIS RAPAT	AGENDA	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Dengar Pendapat dengan Direksi Indonesia Investment Authority (INA)	Membahas Tambahan PMN Tahun 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Indonesia Investment Authority</i> (INA) dalam mengelola investasi untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset dalam mendukung pembangunan agar memenuhi prinsip-prinsip tata kelola lembaga yang profesional, <i>good governance</i>, memiliki kinerja komersial dan manfaat pelayanan publik yang seimbang dan mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. 2. <i>Indonesia Investment Authority</i> (INA) dalam mengelola aset negara dan aset BUMN, agar memiliki strategi pengelolaan aset yang dapat 	Rapat tanggal 2 Desember 2021

NO	JENIS RAPAT	AGENDA	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>melipatgandakan investasi, membawa keahlian investor untuk memberikan nilai tambah pada target investasi, mendukung program pemerintah khususnya pembangunan infrastruktur, <i>asset recycling</i> BUMN, dan membantu likuiditas BUMN pemilik aset sehingga dapat mengurangi eksposur langsung terhadap APBN.</p> <p>3. <i>Indonesia Investment Authority</i> (INA) menyampaikan <i>roadmap</i> atau <i>business plan</i> (termasuk prognosa) Lembaga Pengelola Investasi yang disampaikan sebelum Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan.</p> <p>4. Direktur Utama <i>Indonesia Investment Authority</i> (INA) agar melaporkan secara berkala per 6 (enam) bulan perkembangan dan pengelolaan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Komisi XI DPR RI.</p>	
2.	Rapat Dengar Pendapat Panja Industri Jasa Keuangan dengan OJK dan Komunitas Korban Asuransi AXA	Membahas persoalan perasuransian	1. Otoritas Jasa Keuangan agar menindaklanjuti laporan nasabah asuransi AXA Mandiri, AIA, dan Prudential terkait persoalan kerugian nasabah produk unit link dan melaporkan kepada Komisi XI DPR RI.	Rapat tanggal 6 Desember 2021

NO	JENIS RAPAT	AGENDA	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	Mandiri, AIA, dan Prudential		<ol style="list-style-type: none"> 2. Otoritas Jasa Keuangan agar mengevaluasi kondisi perusahaan asuransi yang ada di Indonesia dan melaporkan kepada Komisi XI DPR RI. 3. Otoritas Jasa Keuangan agar mempertimbangkan untuk melakukan pendampingan hukum terhadap Nasabah Asuransi AXA Mandiri, AIA, dan Prudential. 4. Otoritas Jasa Keuangan agar memperkuat program perlindungan konsumen, pelayanan publik di kantor-kantor Otoritas Jasa Keuangan agar ramah kepada nasabah dan memudahkan proses pengaduan nasabah. 5. Otoritas Jasa Keuangan agar menerapkan bagaimana tanggungjawab literasi dan edukasi tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga industri. 6. Otoritas Jasa Keuangan agar lebih proaktif dalam menyelesaikan persoalan Nasabah Asuransi AXA Mandiri, AIA, dan Prudential. 	
3.	Rapat Dengar Pendapat dengan Direksi PT. PLN (Persero)	Membahas PMN Tahun 2022	1. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam membangun infrastruktur ketenagalistrikan agar mengoptimalkan dan meningkatkan	Rapat tanggal 8 Desember 2021

NO	JENIS RAPAT	AGENDA	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>pemerataan akses listrik bagi seluruh masyarakat serta pelayanan optimal bagi pelanggan/konsumen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam mengelola ketenagalistrikan agar mempercepat capaian bauran energi yang efisien. 3. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam perencanaan investasi agar mengutamakan pengembangan transmisi terkait evakuasi daya dari pembangkit, penurunan Biaya Pokok Penyediaan (BPP), meningkatkan keandalan sistem ketenagalistrikan, dan untuk mendukung peningkatan kinerja penjualan. 4. Untuk mengoptimalkan implementasi PMN Tahun 2022, Pemerintah agar memberikan dukungan atas pembangunan akses infrastruktur jalan dan transportasi, serta dukungan pembebasan lahan. 5. Pemerintah agar memperkuat program pemerataan akses listrik bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan dalam memperoleh akses layanan jaringan listrik. 6. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) 	

NO	JENIS RAPAT	AGENDA	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>agar mempercepat penyelesaian proyek-proyek infrastruktur kelistrikan dari PMN Tahun 2020 sampai Tahun 2021.</p> <p>7. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) agar mempercepat capaian target pengembangan listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).</p>	
4.	Rapat Dengar Pendapat dengan Direksi PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Membahas PMN Tahun 2022	<p>1. Pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) dapat mendukung program satu juta rumah melalui penyediaan fasilitas pembiayaan rumah yang layak dan terjangkau, membuka lapangan kerja, dan memberikan <i>multiplier effect</i> terhadap pertumbuhan ekonomi.</p> <p>2. Direktur Utama PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) agar memanfaatkan seluruh asetnya dalam mendukung penyediaan pendanaan jangka Panjang/menengah kepada lembaga penyalur KPR FLPP, untuk pemenuhan kebutuhan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di tahun 2022.</p>	Rapat tanggal 8 Desember 2021

NO	JENIS RAPAT	AGENDA	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	Rapat Dengar Pendapat dengan Direksi PT. Adhi Karya (Persero)	Membahas PMN Tahun 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dalam menyelesaikan dan mengerjakan ruas-ruas dari Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo dan Jalan Tol Yogyakarta Bawen serta pembangunan proyek Strategis Nasional berupa Penyediaan Air Minum (SPAM) Karian-Serpong (Timur) secara profesional, memastikan kualitas proyek yang baik dan biaya pembangunan yang efisien dan kompetitif; meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko dalam menyelenggarakan bisnisnya. 2. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk agar memberikan <i>multiplier effect</i> pada lapangan pekerjaan, serta manfaat ekonomi dan sosial lainnya. 3. Direktur Utama PT. Adhi Karya (Persero) Tbk agar melaporkan secara berkala perkembangan dan pengelolaan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Komisi XI DPR RI. 	Rapat tanggal 13 Desember 2021
6.	Rapat Dengar Pendapat dengan Direksi Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	Membahas PMN Tahun 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. LMAN dalam pendanaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) dilakukan secara professional, biaya yang efisien dan kompetitif, serta meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko 	Rapat tanggal 14 Desember 2021

NO	JENIS RAPAT	AGENDA	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>dalam menyelenggarakan aktivitas sebagai pengelola dan penggerak optimalisasi aset negara.</p> <p>2. Pelaksanaan pendanaan pengadaan lahan PSN yang dikerjakan LMAN agar memberikan <i>multiplier effect</i> pada lapangan pekerjaan serta manfaat ekonomi dan sosial lainnya.</p> <p>3. Direktur Utama LMAN agar melaporkan secara berkala perkembangan dan pengelolaan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Komisi XI DPR RI.</p>	
7.	Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	Membahas PMN Tahun 2022	<p>1. Komisi XI DPR RI mendukung PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) untuk melakukan <i>Creative Financing</i> dengan penjaminan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur sebagai salah satu alternatif yang dapat dioptimalkan serta meningkatkan kinerja PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).</p> <p>2. Direktur Utama PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) agar melaporkan secara berkala perkembangan dan pengelolaan</p>	Rapat tanggal 14 Desember 2021

NO	JENIS RAPAT	AGENDA	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Komisi XI DPR RI.	
8.	Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan	Pengambilan Keputusan mengenai Tambahan PMN 2021 dan PMN 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah melakukan pendalaman atas tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2021 dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2022. 2. Pemerintah agar melaksanakan Penyertaan Modal Negara (PMN) sesuai arah upaya, kebijakan, dan pelaksanaan PMN 2021 dan 2022. (terlampir) 3. Menteri Keuangan agar segera menyampaikan <i>roadmap</i> dan klasterisasi BUMN yang mendapatkan penugasan misi pembangunan sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dapat menjadi landasan dalam penentuan kebijakan Penyertaan Modal Negara (PMN). 	Rapat tanggal 15 Desember 2021
9.	Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan	Kebijakan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan dari Menteri Keuangan tentang kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Produk Tembakau Lainnya tahun 2022.	Rapat tanggal 15 Desember 2021

NO	JENIS RAPAT	AGENDA	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Menteri Keuangan dalam menjalankan kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau agar memperhatikan kepentingan petani tembakau dan tenaga kerja industri tembakau nasional. 3. Menteri Keuangan dalam menetapkan layer tarif Cukai Hasil Tembakau agar dapat mengantisipasi upaya pabrikan untuk menghindari dari kewajiban cukai yang seharusnya. 4. Menteri Keuangan agar meningkatkan upaya dalam mencegah beredarnya rokok illegal, serta memperkuat kebijakan pengendalian impor tembakau untuk melindungi kepentingan petani tembakau. 5. Menteri Keuangan memperkuat kebijakan DBH CHT untuk dioptimalkan pemanfaatannya bagi kesejahteraan petani tembakau, kesehatan masyarakat, dan penegakan hukum. 6. Pemerintah memperkuat upaya untuk mempercepat penurunan prevalensi anak yang merokok. 7. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan pembinaan kepada industri kecil. 	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN ANGGARAN (BANGGAR)

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
	Badan Anggaran	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="577 459 2110 660">1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Anggaran dengan Pemerintah Provinsi Aceh, Kantor Wilayah Bank Indonesia Aceh dan Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan Aceh terkait Pelaksanaan kebijakan Transfer Daerah dan Dana Desa APBN TA 2021 dan TA 2022 dan Dana Outsus Aceh (01 - 03 Desember 2021 WIB) pada kegiatan kunjungan kerja Badan Anggaran DPR RI.<li data-bbox="577 660 2110 884">2. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Anggaran dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kantor Wilayah Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah terkait Pelaksanaan kebijakan Transfer Daerah dan Dana Desa APBN TA 2021 dan TA 2022 (06 - 08 Desember 2021 WIB) pada kegiatan kunjungan kerja Badan Anggaran DPR RI.<li data-bbox="577 884 2110 1107">3. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Anggaran dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kantor Wilayah Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat dan Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Barat terkait Pelaksanaan kebijakan Transfer Daerah dan Dana Desa APBN TA 2021 dan TA 2022 (14 - 16 Desember 2021 WIB) pada kegiatan kunjungan kerja Badan Anggaran DPR RI.<li data-bbox="577 1107 2110 1310">4. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Anggaran dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kantor Wilayah Bank Indonesia Kalimantan Barat dan Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Barat terkait Pelaksanaan kebijakan Transfer Daerah dan Dana Desa APBN TA 2021 dan TA 2022 (14 - 16 Desember 2021 WIB) pada kegiatan kunjungan kerja Badan Anggaran DPR RI.

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP)

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	BKSAP - KSB	Rapat/Diskusi dengan Kemlu	BKSAP DPR RI menyelenggarakan pertemuan dengan Kemlu RI terkait Prioritas Kebijakan Luar Negeri RI 2022 dan Update Perkembangan Isu-Isu Internasional	Pelaksanaan tgl 13 s.d. 15 Desember 2021
2.	BKSAP - KSR	29 th Asia Pacific Parliamentary Partnership Forum (APPF-29)	Anggota BKSAP DPR RI mengikuti sidang APPF ke-29 yang menghasilkan 13 Draft Resolusi	Pelaksanaan tgl 13 s.d. 15 Desember 2021
3.	BKSAP - KSI	9 th CoSP UNCAC	Delegasi BKSAP DPR RI yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua BKSAP DPR RI menghadiri 9 th Conference of the State Parties to the UN Convention against Corruption di Sharm el-Sheikh, Mesir. Konferensi tersebut diadakan oleh GOPAC, dimana Ketua BKSAP menjabat sebagai Wakil Ketua GOPAC dan Ketua SEAPAC	Pelaksanaan tgl 13 s.d. 17 Desember 2021
4.	BKSAP - KSB	Pertemuan Ketua GKSB Azerbaijan dengan Sekretaris II	Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Azerbaijan, Muhammad Iqbal (A-461/F-PPP) mengadakan	Pelaksanaan tgl 15 Desember 2021

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Bidang Politik Kedutaan Besar Azerbaijan	pertemuan dengan Sekretaris II Bidang Politik Kedutaan Besar Azerbaijan untuk membahas kondisi termutakhir Azerbaijan terkait konflik dengan Armenia dan Pandemi Covid-19 serta rencana kunjungan GKSB ke Azerbaijan.	
5.	BKSAP - KSB	Pertemuan Ketua GKSB Peru dengan Charge d’Affaires Kedutaan Besar Republik Peru	Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Peru, Dyah Roro Esti W.P. (A-322/F-PG) mengadakan pertemuan dengan CdA Kedutaan Besar Republik Peru untuk membahas: - Pengenalan anggota parlemen Peru di dalam Kelompok Persahabatan Parlemen Peru – Indonesia yang baru. - Status MoU antara Kongres Peru dan DPR RI - Pertanyaan mengenai status penunjukan H.E. Mr. Luis Tsuboyama Galvan, sebagai Duta Besar Peru untuk Indonesia	Pelaksanaan tgl 22 Desember 2021

LAPORAN DWI MINGGUAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD)

NO	JUDUL	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan	Kegiatan seminar nasional dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2021 di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara Jakarta Selatan dengan mengundang Badan Kehormatan DPRD Provinsi / Kabupaten sebagai peserta seminar.	- Kegiatan tersebut di hadiri oleh Wakil Ketua DPR RI / Korkesra (A.Muhaimin Iskandar) - Rundown kegiatan seminar terlampir
		Kegiatan paket meeting	Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan melakukan kegiatan Paket Meeting dalam rangka Evaluasi Kegiatan Seminar Nasional Mahkamah Kehormtan Dewan pada tahun 2021	-

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN URUSAN RUMAH TANGGA (BURT)

NO	KEGIATAN	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
1.	<p>13-15 Desember 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kunjungan kerja ke Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II), Palembang dalam rangka pengawasan pelaksanaan keprotokolan. 2. Kunjungan Kerja ke rumah sakit Hermina Palembang, dalam rangka pengawasan pelaksanaan program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peninjauan Pelaksanaan keprotokolan di Bandara SMB II bertujuan untuk mengetahui sejauhmana implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di lingkungan bandara, terutama bagi Anggota DPR RI sebagai pejabat negara. 2. Peninjauan rumah sakit provider Asuransi Jasindo dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi BURT terhadap pelayanan program Jamkestama. 	
2.	<p>22 Desember 2021</p> <p>Rapat Audiensi BURT dengan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Pandeglang</p>	<p>Penyampaian aspirasi masyarakat dan konstituen dari daerah pemilihan Banten</p>	
3.	<p>22-25 Desember 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kunjungan kerja ke Bandara Internasional Domine Eduard Osok Sorong dalam rangka pelaksanaan keprotokolan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peninjauan ke Bandara Internasional Domine Eduard Osok Sorong bertujuan untuk melakukan penjajakan dalam rangka pelaksanaan keprotokolan bagi Anggota DPR RI ketika melakukan perjalanan dinas. 	

NO	KEGIATAN	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
	2. Kunjungan Kerja ke rumah sakit Pertamina Sorong, dalam rangka pengawasan pelaksanaan program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya.	2. Peninjauan rumah sakit provider Asuransi Jasindo dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi BURT terhadap pelayanan program Jamkestama.	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (BAKN)

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KET
1.	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI	Rapat Paket Meeting.	BAKN DPR RI melakukan kegiatan paket meeting dalam rangka penyusunan draft telaahan BAKN DPR RI terhadap LPH BPK RI tahun 2018 sampai dengan 2020 pada mitra kerja komisi VI dan Komisi VII.	Pelaksanaan tgl 13 s.d. 15 Desember 2021
